

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terus menerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Hal ini sejalan dengan konsepsi institusi pendidikan menengah yang telah dibentuk dalam manajemen sekolah untuk berkembang berdasar konsepsi manajemen berbasis sekolah. manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar disekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian

internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula. *Stakeholder* yang baik pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan sekolah. Keaktifan stakeholder akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

Dalam implementasinya belanja disekolah dasar di kelompokkan menjadi tiga komponen antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sumber dana disekolah hendaknya dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Mulyono (2008.,180-181), mengemukakan bahwa pengelolaan mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Undang – Undang nomor 15 tahun 2004 pasal (1), pengelolaan

keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Secara umum manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi – fungsi keuangan dimana fungsi-fungsi ini diterjemahkan dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi (Dirjen Dikdas, Kemdiknas, 2011 : 163).

Kegiatan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan yang dilakukan setiap institusi pendidikan. Sebagai kegiatan yang sangat prinsipil, pengelolaan keuangan harus dikelola secara profesional dengan akuntabilitas yang tinggi. Dalam mengelola keuangan pihak institusi perlu memiliki prinsip pengelolaan dana yang transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu perlu sikap jujur dari seluruh staf saling percaya dan saling berkerja sama dalam mengelola keuangan yang ada dalam institusi masing-masing.

Mengacu pada dana yang tersedia, setiap institusi perlu membuat rencana pengeluaran keuangan yang merupakan penjabaran dari program kerja. Hal tersebut biasanya telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Institusi. Depdiknas (2000:96) mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan rencana anggaran pada suatu institusi pendidikan yakni: a) menginventaris program kegiatan selama satu tahun mendatang, b) menyusun program/kegiatan tersebut berdasarkan jenis dan prioritas, c) menghitung volume, harga satuan dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan, d) membuat kertas kerja dan

lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkan kedalam format acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Biaya pendidikan memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup di dunia pendidikan (David Wijaya : 2009 : 91). Pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh untuk tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. (Nanang Fattah : 2000: 23) mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang saling berkaitan. Yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental yang diterima dari berbagai sumber resmi. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Biaya pendidikan digolongkan menjadi 3 jenis, (PP No 48 Tahun 2008 pasal 3), yaitu: 1) Biaya satuan pendidikan, 2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan 3) Biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan (PP No 48 Tahun 2008) terdiri dari : 1) Biaya investasi yang terdiri dari : a) Biaya investasi lahan pendidikan, b) Biaya investasi selain pendidikan. 2) Biaya operasi yang terdiri dari : a) biaya personalia, b) biaya non personalia. 3) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 5) Biaya personalia dan nonpersonalia (Depdiknas 2010: 4) yaitu : a) Biaya personalia adalah terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan- tunjangan yang melekat pada gaji. b) Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

Berdasarkan hasil pengamatan yang di ketahui bahwa pengelolaan keuangan disekolah Negeri dan disekolah Swasta Dari segi pendanaan Sekolah Negeri hampir seluruh operasional biaya di tanggung oleh negara, seperti untuk SD, SMP/ sederajat telah digratiskan SPPnya. Untuk menyukseskan program wajib belajar dasar 9 tahun yakni SD, SMP/ sederajat pemerintah telah membuat program BOS (bantuan operasional sekolah) yang membiayai keperluan- keperluan penting dalam proses pembelajaran. Sekolah Swasta hanya mendapatkan sedikit bantuan dari pemerintah sehingga untuk pembiayaan operasional sekolah keseluruhan dibebankan kepada siswa.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, maka peneliti merasa tertarik mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan sehingga judul penelitian “Pengelolaan Keuangan Di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Di Kotamobagu”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber-Sumber Keuangan Di SMK Negeri dan SMK Swasta Kotamobagu
2. Pelaksanaan Keuangan Di SMK Negeri dan SMK Swasta Kotamobagu
3. Evaluasi Keuangan Di SMK Negeri dan SMK Swasta Kotamobagu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan Keuangan di SMK Negeri dan di SMK Swasta Di Kec. Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sumber-sumber Keuangan di SMK Negeri dan di SMK Swasta di Kec. Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Keuangan di SMK Negeri dan di SMK Swasta di Kec. Kotamobagu.
4. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Keuangan di SMK Negeri dan di SMK Swasta di Kec. Kotamobagu.

D. Manfaat penelitian

1.) Bagi Kepala Sekolah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pembiayaan pendidikan.

2.) Untuk Seluruh Warga Sekolah

Sebagai bahan masukan terutama kepala sekolah, bendahara tentang substansi keterlibatan komite sekolah dari perencanaan sampai dengan evaluasi pemanfaatan anggaran pembiayaan pendidikan.

3) Untuk Komite Sekolah

Merupakan sebuah badan independen yang mewakili masyarakat dalam pengelolaan sekolah secara transparansi.

4) Untuk Peneliti

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.